

PENGARUH PAD, DAU, SILPA DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL

Zia Afkarina

ziaafkarina0302@gmail.com

Suwardi Bambang Hermanto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to examine the influence of local own source revenue, general allocation fund, Surplus of Financing Budget and territory to the capital expenditure in the districts / cities government in East Java province in 2012-2015 periods. The research method has been done by using purposive sampling with the numbers of samples are 148 financial statements from 38 districts / cities in all East Java provinces. The data is the secondary data has been obtained from the realization of Local Government Budget (APBD) of districts / cities in East Java Province with the observation period is 2012-2015 which has been obtained from the Audit Board of the Republic of Indonesia East Java Province. The result of this research which has been carried out by using multiple analysis shows that local own source revenue, general allocation fund and territory give positive influence to the capital expenditure. Meanwhile, the remaining is Surplus of Financing Budget does not give any significant influence to the capital expenditure, with the R square 0.959 or 95.9%, shows that independent variables give influence to the dependent variable.

Keywords: Local own sources, general allocation fund, Financing Budget Surplus area, capital expenditure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015. Metoda penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 148 laporan keuangan dari 38 Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode observasi tahun 2012-2015 yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian dengan analisis berganda menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, dengan *R square* 0,959 atau 95,9% variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Luas Wilayah, Belanja Modal.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah, serta diberi kewenangan untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut secara efektif dan efisien. Hal ini diharapkan setiap daerah otonom mampu meningkatkan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan sejumlah

dana berupa anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap daerah. Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk program pembangunan berbagai fasilitas publik.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD. Alokasi Belanja Modal tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Belanja Modal dapat berupa pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi sehingga mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan komponen penerimaan daerah yang sangat penting untuk membantu laju pembangunan di daerah. Adanya PAD sendiri dijadikan sebagai modal untuk membiayai belanja di daerah. PAD ini juga menjadi tolok ukur dari keberhasilan daerah dalam mewujudkan daerah mandiri yang sesuai dengan konsep desentralisasi. Pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Modal harus mempertimbangkan PAD yang diterima dan disesuaikan dengan kebutuhan dari suatu daerah sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan Belanja Modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Dalam upaya membiayai kegiatan-kegiatan daerah, selain memanfaatkan PAD, pemerintah daerah juga dapat menggunakan transfer dari pusat berupa DAU. Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004, DAU (Dana Alokasi Umum) didefinisikan sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dianggarkan untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam pendanaan kelengkapan rumah tangga daerahnya. Kaitan antara DAU dengan Belanja Modal merupakan sumber pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana untuk pelayan publik yang lebih baik. Bahwa yang membedakan PAD dengan DAU adalah PAD berasal dari uang yang diperoleh daerah itu sendiri, sedangkan DAU berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dalam membiayai kegiatan pemerintahan selain PAD dan transfer dari pusat, pemerintah pusat juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sebagian besar SILPA digunakan belanja langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Jumlah belanja langsung dapat berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya yang di dalamnya juga belanja tidak langsung lebih kecil dari jumlah belanja tidak langsung. SILPA merupakan sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. SILPA dijadikan indikator efisiensi, karena SILPA akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan netto yang positif dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan.

Anggaran Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah

yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan suatu kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Maksudnya semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik.

Menurut Sholikhah dan Wahyudin (2014) untuk mendukung jalannya pemerintahan yang mandiri, maka pemerintah daerah perlu mencari dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang ada di daerah. Sumber-sumber daya yang telah dikelola oleh pemerintah daerah menjadi salah satu sumber pendanaan bagi belanja daerah, belanja daerah disini lebih diarahkan pada Belanja Modal. Karena Belanja Modal menjadi pendukung dari peningkatan sarana dan prasarana bagi pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi salah satu indikator bagi penilaian kinerja pemerintah dalam mengemban amanah dari rakyat.

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dirumuskan adalah: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal? (2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal? (3) Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal? (4) Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal?. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal dimana dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang.

Dalam teori keagenan terdapat hubungan yang diibaratkan sebagai sebuah kontrak yang mana satu atau lebih prinsipal menyewa orang lain, dalam hal ini disebut agen, untuk melakukan beberapa jasa demi kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976) dalam Sugiardi dan Supadmi (2014).

Terdapat perbedaan antara prinsipal dan agent, sehingga agen tidak selamanya mengikuti keinginan prinsipal. Hubungan keagenan tersebut yang terjadi di pemerintahan antara rakyat sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Pemerintah dapat melakukan kebijakan untuk kepentingan pemerintah dan penguasa maupun mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Agar dapat mengurangi konflik maka diperlukan monitoring kepada prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen.

Otonomi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan

pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Tujuan otonomi daerah dalam undang-undang tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang lebih baik, pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan potensi daerah secara optimal, dan tentunya kemandirian keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

Menurut Halim dan Kusufi (2012) APBD adalah suatu anggaran daerah. APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut : (1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. (2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya beban sesungguhnya dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. (3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. (4) Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Belanja Modal

Menurut Halim (2004), Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal diakui dalam periode berjalan pada saat aktiva yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah. Pengukuran belanja Belanja Modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aktiva tetap.

Menurut Darise (2008), Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu : (1) Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. (2) Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. (3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. (4) Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah.

Dana Alokasi Umum

Menurut Bastian (2001), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana berasal dari APBN, yang dialokasi dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjanya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan sebagai berikut : (1) DAU ditetapkan sekurang-

kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. (2) DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan diatas. (3) DAU untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (4) Porsi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SILPA yang ideal ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah kota/kabupaten. Pelampauan target SILPA yang bersumber dari pelampauan target pemerintah daerah dan efisiensi sangat diharapkan, sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program/kegiatan pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat.

Luas Wilayah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Luas Wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Semakin besar Luas Wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik.

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas Wilayah pemerintahan merupakan jumlah ukuran besarnya wilayah dari suatu pemerintahan, baik itu pemerintahan Kabupaten, Kota, maupun geografis suatu daerah.

Penelitian Terdahulu

Mentayani dan Rusmanto (2013) pada penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan". Sample pada penelitian ini sebanyak 7 Kota dan 39 Kabupaten di Pulau Kalimantan. Tahun penelitian yang digunakan mulai tahun 2010-2012. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan.

Tolu *et al* (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi pada Kota Bitung)". Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini mulai tahun 2004-2013. Pengambilan sample digunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari analisis tersebut adalah Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Kota Bitung.

Febriana (2015) dalam penelitiannya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Tahun penelitian yang digunakan mulai tahun 2012-2014. Sample yang digunakan berjumlah 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel dipilih secara *purposive sumpling*. Data penelitian ini berupa data sekunder. Hasil penelitian tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur.

Permatasari (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur". Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Tahun penelitian yang digunakan mulai tahun 2010-2014. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur.

Susanti dan Fahlevi (2016) dalam penelitiannya yang menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di wilayah Aceh). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 23 Kabupaten/Kota di wilayah Aceh. Tahun penelitian yang digunakan mulai tahun 2011-2014. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik. Analisis data dilakukan menggunakan regersi linear berganda. Diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh.

Tuasikal (2008) dalam penelitiannya yang menguji pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan PDRB terhadap Belanja Modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari 468 Kabupaten/Kota di Indonesia, tetapi 326 yang diamati dan penelitian ini hanya difokuskan pada tahun 2005. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan PDRB tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Sholikhah dan Wahyudin (2014) pada penelitiannya yang berjudul "Analisis Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa". Sample pada penelitian ini berjumlah 93 Kabupaten/Kota di Jawa pada tahun 2010. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Peningkatan investasi modal (Belanja Modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercemin dari peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD.

Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD jika pemerintah daerah mengalokasikan Belanja Modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan Belanja Modal, maka Pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya agar kebutuhan dan kesejahteraan daerah dapat terpenuhi (Febriana, 2015),

Penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan simpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal yaitu Tuasikal (2008), Susanti dan Fahlevi (2016), Febriana (2015) dan Permatasari (2016). Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah :

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. DAU ini sekaligus dapat menunjukkan kemandirian daerah. Semakin banyak DAU yang diterima, berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri begitu juga sebaliknya (Mentayani dan Rusmanto, 2013).

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Harianto dan Adi, 2007). Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan. Disamping itu pemerintah daerah dapat menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui Belanja Modal.

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Sisa anggaran tahun sebelumnya, yang menjadi bagian dari penerimaan dalam pembiayaan di APBD Kabupaten/Kota tahun berjalan, memberikan kontribusi berarti terhadap pengalokasian belanja daerah. Sisa anggaran tahun lalu penting untuk pendanaan belanja tahun berjalan. Dari perspektif yang lebih luas, dibutuhkan pemahaman tentang perbedaan antara Kabupaten dan Kota dalam konteks penggaran daerah dan makna tersembunyi dalam penggunaan sisa anggaran pada tahun anggaran berjalan . Dalam kaitannya dengan APBD, SILPA tahun anggaran sebelumnya merupakan salah satu komponen penerimaan daerah. Sebagian SILPA disumbangkan ke belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat (Febriana, 2015).

Dibandingkan rencana anggaran yang disahkan pada awal tahun (APBD-M), SILPA lebih disebabkan oleh kegagalan dalam merealisasikan belanja dibandingkan keberhasilan realisasi pendapatan. SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Mentayani dan Rusmanto, 2013).

H₃: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal

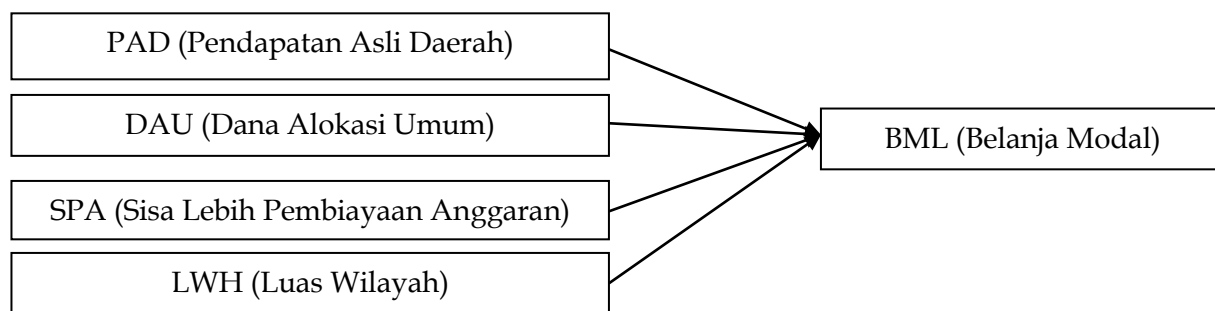
Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah dan Wahyudin (2014), luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Daerah dengan wilayah yang lebih luas, Belanja Modalnya akan cenderung lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan, daerah yang wilayahnya lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak, pembangunan infrastrukturnya harus lebih banyak sehingga Belanja Modal yang dianggarkan harus lebih besar pula.

Daerah yang mempunyai wilayah yang lebih luas penduduknya lebih banyak sehingga untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana serta menunjang berbagai produktivitas masyarakat di daerah tersebut, maka harus disediakan infrastruktur yang memadai yang sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk di daerah tersebut.

H₄: Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Model Penelitian



Gambar 1
Model Penelitian

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Penelitian ini menggunakan 1 variabel dependen yakni Belanja Modal dan 4 variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas

Wilayah. Populasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, menggunakan laporan realisasi anggaran pada tahun 2012-2015.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik *purposive sampling* untuk mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Merupakan metode pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur yang mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 4 tahun berturut-turut pada periode tahun 2012-2015. (2) Laporan Realisasi APBD yang sudah di audit oleh BPK secara lengkap.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*Secondary Data*). Sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung atau dengan menggunakan dokumen-dokumen yang didapat oleh peneliti dan diolah lebih lanjut. Seperti Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2012-2015. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah keterangan tertulis yang dimiliki oleh instansi, sesuai dengan penelitian ini maka instansinya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Terdapat lima variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut terdiri dari satu variabel dependen (terikat) dan empat variabel independen (bebas). Dalam penelitian ini definisi operasional variabel yakni:

1. Belanja Modal (BML)

Menurut Halim (2004) Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal diakui dalam periode berjalan pada saat aktiva yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah. Pengukuran Belanja Modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aktiva tetap. Dalam penelitian ini Belanja Modal dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Variabel Belanja Modal dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatandan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya + Belanja Aset Lainnya

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004), PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

PAD = Pendapatan Pajak Daerah + Pendapatan Retribusi Daerah + Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Bastian (2001) DAU adalah dana berasal dari APBN, yang dialokasi dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjanya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya, DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Febriana, 2015). Dalam penelitian ini DAU dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Untuk menghitung DAU untuk Kabupaten/Kota atas dasar alokasi adalah sebagai berikut:

$$\text{DAU} = (\% \times \text{bobot}) \times (\text{DAU Kabupaten/Kota})$$

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SPA)

Pertumbuhan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SILPA yang ideal ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pelampauan target SILPA yang bersumber dari pelampauan target pemerintah daerah dan efisiensi sangat diharapkan, sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program/kegiatan pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat. SILPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Dalam penelitian ini SILPA dapat dilihat dari jumlah SILPA yang ada di laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Untuk menghitung SILPA rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{SILPA} = \text{Surplus/Defisit} + \text{Pembiayaan Netto}$$

5. Luas Wilayah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintah maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Luas wilayah daerah merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengalokasikan Belanja Modal. Luas wilayah daerah diukur dengan melihat berapa luas wilayah daerah tersebut. Luas Wilayah ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Fatmawati, 2013). Dalam penelitian ini data luas wilayah diperoleh dari www.kemendagri.go.id Provinsi Jawa Timur.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) 23. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu variabel. Analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) merupakan analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. Dengan rumus:

$$BML = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 SPA + \beta_4 LWH + e$$

Keterangan:

BML : Belanja Modal

α : Konstanta

β : Slope atau koefisien regresi

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

SPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

LWH : Luas Wilayah

e : Standar error (*error term*)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD (Juta)	148	16.216	4.035.649	309.434	603.753
DAU (Juta)	148	161.317	1.586.837	822.724	274.464
SPA (Juta)	148	12.599	1.414.930	255.353	216.183
LWH (km ²)	148	16	5.782	1.264	1.105
BML (Juta)	148	6.765	2.367.567	327.624	290.261
Valid N (listwise)	148				

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Luas Wilayah dalam km²

Sumber : Data sekunder diolah, 2017

Tabel 1 menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar Rp 16.216 Juta dan nilai maksimum sebesar Rp 4.035.649 Juta. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 309.434 Juta dengan standar deviasi sebesar Rp 603.753 Juta. Hal ini menunjukkan ada progres yang cukup baik dalam rangka optimalisasi potensi PAD. (2) Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum sebesar Rp 161.317 Juta dan nilai maksimum sebesar Rp 1.586.837 Juta. Sedangkan nilai rata-rata sebesar Rp 822.724 Juta dan standar deviasi sebesar Rp 274.464 Juta. Kecilnya nilai standar deviasi dibanding dengan nilai rata-rata

menunjukkan bahwa distribusi cenderung normal. (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SPA) memiliki nilai minimum sebesar Rp 12.599 Juta dan nilai maksimum sebesar Rp 1.414.930 Juta. Sedangkan nilai rata-rata sebesar Rp 255.353 Juta dan standar deviasi sebesar Rp 216.183 Juta. Kecilnya nilai standar deviasi dibanding dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa distribusi cenderung normal. (4) Luas Wilayah (LWH) memiliki nilai minimum sebesar 16 km² dan nilai maksimum sebesar 5.782 km². Sedangkan nilai rata-rata sebesar 1.264 km², nilai tersebut lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 1.105 km² yang menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. (5) Belanja Modal (BML) memiliki nilai minimum sebesar Rp 6.765 Juta dan nilai maksimum sebesar Rp 2.367.567 Juta. Sedangkan nilai rata-rata sebesar Rp 327.624 Juta dan standar deviasi sebesar Rp 290.261 Juta. Kecilnya nilai standar deviasi dibanding dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dengan hasil Histogram diketahui bahwa kurva dependen dan *regression standardized residual* membentuk gambar seperti lonceng. Berdasarkan *Normal P-Plot Regression Standardized* terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Oleh karena itu berdasarkan uji normalitas, analisis regresi layak digunakan. Analisis uji statistik Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) menggunakan bantuan SPSS versi 23 diketahui bahwa bahwa asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 atau probabilitas di atas 0,05 ($0,200 > 0,05$) maka dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Nilai *tolerance* semua variabel independen lebih besar dari 0,10, demikian pula nilai VIF pada *Collinearity Statistic* lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel-variabel independen (tidak terjadi multikolinieritas).

Uji Autokorelasi

Dari hasil output nilai Durbin-Watson (D-W) adalah sebesar 1,659 (terletak antara -2 sampai +2), maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi adanya autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola grafik *Scatterplot*. Berdasarkan grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SPA) dan Luas Wilayah (LWH) terhadap Belanja Modal (BML). Hasil dari analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	-8090,043	14173,017		-,571	,569
	PAD	,391	,019	,895	21,078	,000
	DAU	,239	,025	,288	9,443	,000
	SPA	-,079	,055	-,069	-1,453	,149
	LWH	16,965	5,418	,081	3,131	,002

a. Dependent Variable: BML

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Dari tabel 2 yang menunjukkan hasil dari analisis regresi berganda di atas, dapat disusun fungsi atau persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut:

$$BML = -8.090,043 + 0,391 PAD + 0,239 DAU - 0,079 SPA + 16.965 LWH + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,980 ^a	,961	,959	46678,276

a. Predictors: (Constant), LWH, SPA, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BML

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Dari tabel 3 yang disajikan di atas, diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,959 atau 96 persen. Artinya perubahan yang terjadi pada variabel Belanja Bodal sebesar 96 persen mampu dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah sebagai variabel independen. Sedangkan sisanya yaitu 4 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)

Tabel 4
Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6168013880389,085	4	1542003470097,271	707,711	,000 ^b
	Residual	252747925350,915	116	2178861425,439		
	Total	6420761805740,000	120			

a. Dependent Variable: BML

b. Predictors: (Constant), LWH, SPA, DAU, PAD

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Dari hasil pengujian kelayakan model regresi (*goodness of fit*) yang telah disajikan pada tabel ANOVA diatas, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 707,711 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk layak atau baik untuk dijadikan sebagai alat estimasi dan dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Tabel 5
Hasil Uji Parameter Individual (Uji t)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-8090,043	14173,017		-,571	,569
	PAD	,391	,019	,895	21,078	,000
	DAU	,239	,025	,288	9,443	,000
	SPA	-,079	,055	-,069	-1,453	,149
	LWH	16,965	5,418	,081	3,131	,002

a. Dependent Variable: BML

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Pengujian Hipotesis

Hipotesis pertama (H_1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BML), Berdasarkan Tabel 5 Pendapatan Asli Daerah mempunyai t hitung sebesar 21,078 dengan signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,050) yang berarti Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Jadi, hipotesis pertama diterima.

Hipotesis kedua (H_2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BML), Berdasarkan Tabel 5 Dana Alokasi Umum mempunyai t hitung sebesar 9,443 dengan signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,050) yang berarti Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Jadi, hipotesis kedua diterima.

Hipotesis ketiga (H_3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BML), Berdasarkan Tabel 5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mempunyai t hitung sebesar -1,453 dengan signifikansi 0,149 (lebih besar dari 0,050) yang berarti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Jadi, hipotesis ketiga ditolak.

Hipotesis keempat (H_4) Luas Wilayah (LWH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BML), Berdasarkan Tabel 5 mempunyai t hitung sebesar 3,131 dengan signifikansi 0,002 (lebih kecil dari 0,050) yang berarti Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Jadi, hipotesis keempat diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BML). Hasil penelitian ini berpengaruh positif yang berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh daerah maka semakin besar pula Belanja Modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut.

Besar kecilnya PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan untuk tujuan pembangunan didaerahnya, semakin besar PAD pada suatu daerah, maka daerah tersebut dapat dikatakan semakin mandiri dalam pelaksanaan pembangunan di

daerahnya dan diharapkan di masa yang akan datang peran PAD dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah akan semakin meningkat. Dengan demikian, meningkatnya PAD akan mempengaruhi pemerintah daerah dalam merencanakan Belanja Modal daerah. Sejalan dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa PAD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan Belanja Modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Antara PAD dengan Belanja Modal terjadi suatu hubungan timbal balik dalam keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula Belanja Modal (Febriana, 2015).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Febriana (2015), Permatasari (2016), Susanti dan Fahlevi (2016), Tuasikal (2008), Sholikhah dan Wahyudin (2014) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Di sisi lain, hasil ini tidak mendukung penelitian dari Mentayani dan Rusmanto (2013), Tolu *et al* (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BML). Hasil penelitian ini berpengaruh positif yang berarti semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah maka semakin besar pula Belanja Modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut. Semakin besar Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat maka akan mendorong pengeluaran daerah yang besar juga didalam membiayai kegiatan pemerintah daerah tersebut. Semakin besar kebutuhan daerah maka semakin besar pula Dana Alokasi Umum yang diperoleh pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum memiliki keterkaitan dengan Belanja Modal, karena Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah daerah fungsinya ditujukan untuk mendanai belanja pemerintah daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik yang dapat tercipta melalui pembangunan infrastruktur dan prasaranan. Maka dari itu semakin tinggi DAU yang diterima maka belanja modal juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Febriana (2015), Permatasari (2016), Susanti dan Fahlevi (2016), Tuasikal (2008) dan Tolu *et al* (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Di sisi lain, hasil ini tidak mendukung penelitian dari Mentayani dan Rusmanto (2013), Sholikhah dan Wahyudin (2014) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BML). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebenarnya lebih utama untuk membiayai defisit realisasi anggaran tahun depan, namun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tersebut untuk belanja habis pakai, yang kemudian pemerintah mengeluarkan himbuan untuk lebih mengalokasikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran kepada belanja sarana dan prasarana.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, Belanja Modal dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran yang belum diselesaikan. Sehingga tidak seluruhnya Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran digunakan untuk Belanja Modal seutuhnya karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat membantu suatu daerah untuk menutupi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Febriana (2015) yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Di sisi lain, hasil ini tidak mendukung penelitian dari Mentayani dan Rusmanto (2013) yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Luas Wilayah (LWH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BML). Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa, daerah dengan Luas Wilayah yang lebih luas, Belanja Modal akan cenderung lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan, daerah dengan wilayahnya yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak, pembangunan infrastrukturnya harus lebih banyak sehingga Belanja Modal yang dianggarkan harus lebih besar pula.

Daerah yang mempunyai wilayah yang lebih luas penduduknya lebih banyak sehingga untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana serta menunjang berbagai produktivitas masyarakat di daerah tersebut, maka harus disediakan infrastruktur yang memadai yang sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk di daerah tersebut.

Anggaran Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas (Fatmawati, 2013). Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Sholikhah dan Wahyudin (2014) yang menyatakan bahwa Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula Belanja Modal karena antara PAD dengan Belanja Modal terjadi hubungan yang timbal balik dalam keuangan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditunjukkan untuk kepentingan publik, sehingga hal ini akan meningkatkan Belanja Modal. Disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan Belanja Modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima oleh setiap daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa semakin tinggi DAU maka pengeluaran pemerintah atas Belanja Modal akan semakin tinggi, terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan Belanja Modal. Dana Alokasi Umum yang tinggi akan meningkatkan

perekonomian dan kebutuhan daerah sehingga belanja pemerintah atas Belanja Modal pun meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat yaitu DAU, dengan pengeluaran pemerintah melalui Belanja Modal.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebenarnya lebih utama untuk membiayai defisit realisasi anggaran tahun depan, namun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tersebut untuk belanja habis pakai, yang kemudian pemerintah mengeluarkan himbauan untuk lebih mengalokasikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran kepada belanja sarana dan prasarana.

Luas Wilayah (LWH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa daerah dengan wilayah yang lebih luas, Belanja Modalnya akan cenderung lebih tinggi. Hal ini dikarenakan, daerah yang wilayahnya lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak, pembangunan infrastrukturnya harus lebih banyak sehingga Belanja Modal yang dianggarkan harus lebih besar pula.

Saran

Dari hasil pengujian pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal, maka penulis memberikan saran bagi pihak yang memerlukan sebagai berikut: (1) Bagi pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya untuk Belanja Modal, dalam jangka panjang sebaiknya Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur perlu mengurangi ketergantungan atas transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat. Manajemen pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk Belanja Modal perlu lebih diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah khususnya untuk Belanja Modal harus lebih difokuskan pada sektor-sektor yang mampu mendorong peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. (2) Bagi penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk menambah faktor-faktor lain yang mempengaruhi Belanja Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah : Akuntansi Sektor Publik*. PT Indeks. Jakarta.
- Fatmawati, S. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Langsung pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 2(7): 1-19.
- Febriana, S. I. 2015. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 4(9): 1-22.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- Hariato, D. dan P. H. Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga : 1-26.

- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mentayani dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan. *Jurnal InFestasi* 9(2): 91-102.
- Permatasari, I. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(1): 1-17.
- Sholikhah, I. dan A. Wahyudin. 2014. Analisis Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa. *Jurnal Analisis Akuntansi* 3(4): 553-562.
- Sugiardi, N. P. D. E. R. dan N. L. Supadmi. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7(2): 477-495.
- Susanti, S., dan H. Fahlevi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di wilayah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1(1): 183-191.
- Tolu, A., E. N. Walewangko, dan S. Y. L. Tumangkeng. 2016. Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2): 540-549.
- Tuasikal, A. 2008. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan PDRB terhadap Belanja Modal pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* 1(2):142-155.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.